

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, B. N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Darwin, P. (2012). *Money Laundering "Cara Memahami dengan Tepat dan Benar SoalPencucian Uang"*. Jakarta: Sinar Ilmu.
- Deni, S. (2010). *Korupsi Birokrasi Konsekuensi dan Tindakan dalam Etika AdministrasiPublik*. Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, A. (1991). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. (2021). *Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya PencegahanKorupsinya*. Jakarta: Desk Study.
- Jahja, H. J. (2012). *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Karsona, A. M. (2011). *Pengertian Korupsi, dalam Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Lamintang. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Lamintang. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Merpaung, L. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyanto. (2002). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renika Cipta.
- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis danMasalahnya*. Jakarta: Alumni.

- Muladi, & Nawawi, B. (1984). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Poernomo, B. (1985). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (1981). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Purwanto, A. (2020). *Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online Di Sekolah Dasar*. Tangerang: Universitas Pelita Harapan.
- Rodliyah, & Salim. (2019). *Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: AlumniAHAEM-PTHEAM.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tandra, H. (2020). *Virus Corona Baru COVID-19*. Yogyakarta: Andi Offset.

JURNAL

- Alfisyah, N. (2021, Mei). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi COVID-19. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 9(2), 381.
- Arsjad, M. (2018). Gratifikasi Pelayanan Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Akta Yudusia*, 3, 988.
- Fandias, Y. P. (2014, Juni 2). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*(XVI), 74-89.
- Hiariej, E. O. (2019, Februari). United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(1), 112-125.
- Lawrence. (1992). Note, Let Me Seller Beware: Money Merchant and 18 U.S.C. *Banking Crime Law Rev*, 33, 1956-1957.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 224.
- Panjaitan, L. S. (2016). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) Di Kabupaten Jayawijaya. *USU Law Jurnal*, 91.
- Patmos, Y. (2017, Desember). Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2, 103-124.

- Rahmansyah, W., Qadri, A. R., Resa, & Ikhsan, A. S. (2020). Pemetaan Permasalahan penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1, 90-102.
- Rajab, H. (2021). Modus Operandi Korupsi dan Kaitannya dengan Aparatur Negara dalam Hadis-Hadis Nabi dan perundang-Undangan di Indonesia. *Al Quds*, 5, 107.
- Sitanggang, B., Tangdililing, A., & Maryuni, S. (2014). Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN*, 36.
- Sulzer, S. (1996). Money Laundering: The Scope of Problem and Attempts to Combat It. *Tennese L*, 47.
- Susilo, A. (2020). Coronavirus Desease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotisme

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUMBER LAIN

- Al-Eiqri, A. (2020, Februari 18). *ICW Ungkap Modus Favorit Koruptor Curi Uang Rakyat*. Diambil kembali dari Alinea: <https://www.alinea.id/nasional/icw-ungkap-modus-favorit-koruptor-curi-uang-rakyat-b1Zlh9rCI>
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. (2021, Januari 20). *Tulisan Hukum: Tinjauan Hukum Terkait Bantuan Sosial Dalam Penanganan Covid*. Diambil kembali dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara: <https://kaltara.bpk.go.id/tulisan-hukum-tinjauan-hukum-terkait-bantuan-sosial-dalam-penanganan-covid/>
- FNH. (2016, April 22). *Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a>
- NNP. (2016, Maret 29). *Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UUTIPIKOR*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penting-begini-caranya-maknai-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt56fa8f4211fd1>
- Prakerja. (2021, Juni 15). *Apa itu kartu prakerja?* Diambil kembali dari Prakerja: <https://prakerja.go.id/tentangkami>
- Pramesti, T. J. (2013, Agustus Jum'at). *Cara Menentukan Adanya Kerugian Keuangan Negara*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-adanya-kerugian-keuangan-negara-lt51fb46e7a8edc>